

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asikin, Zainal 2016, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bachtiar, 2022, *Mendesain Penelitian Hukum*, Budi Utama, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., 2007, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Yogyakarta
- Khairani, 2021, *Pengantar Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Khakim, Abdul, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Perss, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soepomo, Imam, 2001, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suryabarata, Sumadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Univesitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Wijayanti, Asri, 2011, *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*, Lubuk Agung, Bandung.
- Wijaya, Andika, 2018, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Lembaran Negara 1992

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembar Negara No. 39, 2003 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4279

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Lembaran Negara No. 150, 2004 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4456

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembar Negara No.82, 2011 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaran Negara No. 116, 2011 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5256

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara No. 245, 2020 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua

## **Tugas Akhir**

Aditya Rachman Rosadi, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja OUTSOURCING Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Natashya Alexandra, 2015, “Perbandingan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun Pada PT. Jamsostek dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## **Makalah dan Artikel**

BPJS Ketenagakerjaan. 2022. “Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)”, *Makalah*, Disampaikan dalam FGD Perlindungan Tenaga Kerja Ter-PHK dan Mengganggu yang diselenggarakan oleh Puslit DPR RI pada 22 Februari 2022. Jakarta

Ditjen PP, Kemenkumham, “Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan”, *Artikel*, Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, 27 oktober 2014

Kementerian Ketenagakerjaan. 2022. “Perlindungan Tenaga Kerja Ter-PHK (Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan)”, *Makalah*, Disampaikan dalam FGD Perlindungan Tenaga Kerja Ter-PHK dan Mengganggu yang diselenggarakan oleh Puslit DPR RI pada 22 Februari 2022. Jakarta

## **Internet**

Kata Data, <https://katadata.co.id/iftitah/berita/pengertian-penelitian-deskriptif-ciri-ciri-jenis-dan-pelaksanaannya>, diakses 1 April 2022

Hukum Online, <https://www.hukumonline.go.id/Rofiq/Hidayat-Begini-Tata-Cara-Pembentukan-Rancangan-Permenaker>, di akses 25 Februari 2022

Kompas.com, Minimnya partisipasi Permenaker soal JHT, <https://amp.kompas.com/nasional/read/ombusman-soroti-minimnya-pertisipasi-buruh-dalam-permenaker-soal-jht>, di akses 22 Februari 2022

Ditjenpp Kemenkumham, Proses pengharmonisasian sebagai upaya meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=232:proses-pengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan&catid=100&itemid=180](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=232:proses-pengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan&catid=100&itemid=180) diakses 27 oktober 2014